

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Surabaya melalui Indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Clara Rossa Wibisono ^{1*}, Fidela Salsabillah ², Revienda Anita Fitrie ³, Eva Hany Fanida ⁴

^{1, 2, 3, 4} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674008@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Regional autonomy gives local governments broader authority to manage regional resources and finances in order to support development and improve public welfare. As one of Indonesia's largest metropolitan cities, Surabaya has relatively strong fiscal capacity. However, previous studies have generally focused on specific financial ratios and have not comprehensively evaluated the financial performance of the Surabaya City Government using multiple Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) indicators. This study aims to evaluate the financial performance of the Surabaya City Government through APBD indicators during the 2020–2024 period. This research used a quantitative approach with a descriptive method. The study used secondary data obtained from the realization reports of the Surabaya City Government APBD for the 2020–2024 period. Data were collected through documentation and analyzed using regional financial ratios, including the regional independence ratio, effectiveness ratio of Local Own-Source Revenue (PAD), expenditure efficiency ratio, and fiscal decentralization ratio. The study also applied the value for money approach, which emphasizes economy, efficiency, and effectiveness in regional budget management. The results indicate that the financial performance of the Surabaya City Government was generally good, particularly in terms of regional fiscal independence. However, the effectiveness of PAD and expenditure efficiency fluctuated during the observation period. The findings imply that Surabaya has strong fiscal capacity but still needs to improve revenue planning and expenditure control. In conclusion, Surabaya's financial performance reflects strong regional fiscal independence, although further optimization is required in PAD effectiveness and budget efficiency.

Keywords: *Regional Financial Performance, Regional Budget (APBD), Regional Financial Ratios, Value for Money, Surabaya City Government*

Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta sumber daya yang dimiliki daerah (Khosaiful et al., 2024; Marthahudi, 2024). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik (Heryanti, 2025; Santina, 2024). Selain itu, otonomi daerah juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan (Prasetyo et al., 2023).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Mandasari et al., 2024; Rahman et al., 2022). Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara sistematis dan terencana melalui instrumen kebijakan yang jelas, salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD (Prasetyo et al., 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat seluruh rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. APBD disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan program pembangunan, mengalokasikan sumber daya keuangan, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dengan demikian, APBD memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif (Prasetyo et al., 2023). Selain sebagai alat perencanaan keuangan daerah, APBD juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah secara optimal serta menjaga keseimbangan fiskal daerah (Julaeha et al., 2024; Hidayatuzzahroh et al., 2025).

Evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Setiani et al., 2025). Salah satu metode yang banyak digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan daerah yang bersumber dari laporan realisasi APBD (Siswanto et al., 2022; Putri et al., 2021).

Analisis rasio keuangan daerah dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah serta tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran daerah. Beberapa rasio yang umum digunakan antara lain rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio efisiensi belanja, dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Melalui analisis rasio tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri serta tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. (Setiani et al., 2025).

Rasio kemandirian daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara optimal (Setiani et al., 2025).

Selain rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber pendapatan

daerah secara optimal dan mencapai target pendapatan yang telah direncanakan (Setiani et al., 2025). Di sisi lain, rasio efisiensi belanja digunakan untuk menilai seberapa optimal penggunaan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Cheryll et al., 2025; Pandjaitan et al., 2018).

Pengelolaan belanja daerah yang efisien menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya keuangan secara tepat guna sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal. Oleh karena itu, analisis rasio efisiensi menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran daerah (Syamsidar et al., 2025). Selain melalui analisis rasio keuangan, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dilakukan dengan pendekatan *value for money* yang menekankan pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah penggunaan anggaran daerah telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan menerapkan prinsip *value for money*, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan dan akuntabel (Alexandre et al., 2023).

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagai pusat perdagangan, industri, dan jasa, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi serta potensi fiskal yang relatif besar dibandingkan dengan banyak daerah lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat (Karlina et al., 2020). Meskipun memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat, pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya tetap menghadapi tantangan dalam menjaga efektivitas pendapatan daerah dan efisiensi belanja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan APBD Kota Surabaya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan fokus dan cakupan yang berbeda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal karena struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sehingga optimalisasi sumber pendapatan daerah tetap menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan daerah (Aini et al., 2026). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa APBD memiliki peran penting sebagai instrumen perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah (Prasetyo et al., 2023).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah melalui laporan realisasi APBD (Siswanto et al., 2022; Putri et al., 2021). Selain itu, penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa rasio kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan indikator keuangan lainnya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan akuntabel (Setiani et al., 2025). Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu cenderung mengkaji aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan daerah secara terpisah, sehingga evaluasi yang mengintegrasikan berbagai indikator APBD masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada konteks Kota Surabaya, penelitian sebelumnya menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya secara umum berada pada kategori cukup baik, terutama dari aspek

kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah (Karlina et al., 2020). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Surabaya memiliki kemampuan fiskal yang relatif kuat dibandingkan dengan banyak daerah lain. Namun, kajian tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dari segi periode analisis dan cakupan indikator yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu cenderung hanya menekankan pada rasio tertentu, seperti kemandirian daerah atau efektivitas Pendapatan Asli Daerah, sehingga belum sepenuhnya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan daerah berdasarkan indikator APBD (Karlina et al., 2020; Setiani et al., 2025).

Berdasarkan perbandingan beberapa studi sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat gap penelitian, yaitu belum banyak kajian yang secara khusus mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggabungkan beberapa indikator APBD secara lebih komprehensif, seperti rasio kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, dan derajat desentralisasi fiskal. Padahal, penggunaan beberapa indikator tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, mengendalikan belanja, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat (Setiani et al., 2025; Prasetyo et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui pendekatan indikator APBD secara lebih komprehensif dengan menggabungkan beberapa rasio keuangan daerah sebagai dasar analisis. Penelitian ini tidak hanya melihat kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menilai tingkat kemandirian fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, serta derajat desentralisasi fiskal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, dan derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya melalui indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kinerja keuangan secara objektif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis rasio keuangan yang diperoleh dari data APBD, sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu (Setiani et al., 2025).

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai objek penelitian dengan unit analisis berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya periode 2020–2024. Kota Surabaya dipilih karena merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi serta kapasitas fiskal yang relatif kuat dibandingkan dengan banyak daerah lainnya. Selain itu, Surabaya juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian regional di

Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadikan Surabaya sebagai daerah yang menarik untuk dianalisis dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan APBD (Karlina et al., 2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah tersedia dalam bentuk dokumen atau laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya pada periode penelitian tertentu. Data tersebut mencakup informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, belanja daerah, serta dana transfer dari pemerintah pusat. Penggunaan data sekunder dinilai lebih efektif karena data yang digunakan telah melalui proses verifikasi dan publikasi resmi oleh pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk analisis kinerja keuangan daerah secara akurat (Madaniyah et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti laporan realisasi APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, serta dokumen publik lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Data tersebut dapat diperoleh melalui situs resmi pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maupun lembaga pemerintah yang mempublikasikan laporan keuangan daerah secara terbuka. Penggunaan sumber data resmi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi (Prasetyo et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang dianalisis meliputi laporan realisasi APBD, laporan keuangan daerah, serta dokumen kebijakan keuangan daerah lainnya. Metode dokumentasi sering digunakan dalam penelitian keuangan sektor publik karena memungkinkan peneliti memperoleh data historis yang lengkap serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu (Prasetyo et al., 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian sektor publik untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui analisis rasio keuangan, peneliti dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, serta mandiri. Analisis ini juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah serta tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Setiani et al., 2025).

Dalam penelitian ini, beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, serta rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio kemandirian daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dengan menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara itu, rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Alexandre

et al., 2023). Selain itu, tingkat desentralisasi fiskal juga dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sebaliknya, apabila kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya masih memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hasil

Hasil pengolahan data berdasarkan data mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya periode 2020-2024 diuraikan melalui analisis realisasi APBD serta berbagai rasio keuangan daerah yang relevan. Penyajian tidak berhenti pada pemaparan angka, tetapi juga menelusuri kecenderungan, hubungan, antarvariabel, dan dinamika yang terjadi dari tahun ke tahun. Temuan yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada konsep pengelolaan keuangan daerah, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gambaran Umum Realisasi APBD Kota Surabaya 2020–2024

Berdasarkan data realisasi APBD Kota Surabaya selama periode 2020–2024, kinerja keuangan daerah menunjukkan dinamika yang cukup menarik, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan, dan belanja daerah. APBD digunakan sebagai instrumen untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui realisasi pendapatan dan belanja (Alexandre et al., 2023; Maryanti et al., 2021). Ringkasan data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi APBD Kota Surabaya Tahun 2020–2024 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Transfer Pusat	Surplus/Defisit
2020	4,50	8,80	9,00	3,10	-0,20
2021	4,70	9,30	9,10	3,20	+0,20
2022	5,31	8,79	9,45	2,52	-0,66
2023	6,59	10,72	10,82	2,57	-0,10
2024	6,70	9,94	9,60	2,60	+0,34

Berdasarkan Tabel 1, PAD Kota Surabaya menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp4,50 triliun pada tahun 2020 menjadi sekitar Rp6,70 triliun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri semakin kuat, yang merupakan indikator meningkatnya kemandirian fiskal daerah. Namun, jika dilihat dari sisi pendapatan total, terjadi fluktuasi terutama pada tahun 2022 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, belanja daerah pada beberapa tahun masih lebih tinggi dibanding pendapatan, yang menyebabkan defisit, seperti pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Transfer dari pemerintah pusat cenderung menurun sejak tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang.

Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Untuk melihat kinerja keuangan daerah secara lebih mendalam, digunakan analisis beberapa rasio keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan desentralisasi fiskal. Rasio keuangan daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan optimal (Putra et al., 2024).

Tabel 2. Rasio Kinerja Keuangan Kota Surabaya

Tahun	Kemandirian (%)	Efektivitas PAD (%)	Efisiensi (%)	Desentralisasi (%)
2020	145%	90%	102%	51%
2021	147%	96%	98%	50%
2022	210%	87,7%	107%	60%
2023	256%	89%	101%	61%
2024	256%	88%	96,5%	67%

Berdasarkan Tabel 2, kinerja keuangan Kota Surabaya tahun 2020–2024 menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama pada rasio kemandirian yang meningkat dari 145% menjadi 256% dan rasio desentralisasi fiskal yang naik dari 51% menjadi 67%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan semakin kuat. Namun, rasio efektivitas PAD masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target, sedangkan rasio efisiensi juga belum stabil karena beberapa tahun masih berada di atas 100%. Dengan demikian, kinerja keuangan Kota Surabaya cukup baik dari aspek kemandirian dan desentralisasi, tetapi masih perlu ditingkatkan pada efektivitas PAD dan efisiensi belanja daerah. (Putra et al., 2024)

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian Kota Surabaya berada di atas 100% selama periode penelitian, bahkan meningkat sejak tahun 2022 hingga mencapai lebih dari 250% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa PAD jauh lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, di mana daerah mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri (Maryanti et al., 2021).

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD berada pada kisaran 87% hingga 96%. Tahun 2021 menjadi tahun dengan kinerja terbaik karena realisasi PAD hampir mencapai target yang ditetapkan. Namun, setelah itu terjadi penurunan, terutama pada tahun 2022 hingga 2024 yang berada di bawah 90%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya optimal. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan (Putra et al., 2024).

Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi menunjukkan hasil yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, 2022, dan 2023, nilai rasio berada di atas 100%, yang berarti belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan dan dapat dikategorikan kurang efisien. Efisiensi anggaran mencerminkan perbandingan antara input dan output dalam pengelolaan keuangan daerah (Syamsidar et al., 2025). Namun, pada tahun 2024 rasio ini turun menjadi 96,5%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan demikian, meskipun sempat mengalami ketidakefisienan, tren terbaru menunjukkan arah yang lebih baik.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal Kota Surabaya berada pada kisaran 50% hingga 67%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah berasal dari PAD. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah (Maryanti et al., 2021). Kenaikan rasio ini dari tahun ke tahun memperlihatkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri semakin meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah.

Komposisi Pendapatan Daerah

Untuk melihat struktur pendapatan daerah secara lebih komprehensif, Komposisi pendapatan daerah dianalisis berdasarkan kontribusi PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Analisis ini digunakan untuk melihat tingkat kemandirian fiskal daerah semakin besar proporsi PAD dalam struktur pendapatan, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri, sebaliknya dominasi dana transfer menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal (Putra et al, 2024). Oleh karena itu analisis komposisi ini menjadi penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah dan arah kebijakan fiskal yang selanjutnya disajikan secara rinci pada Tabel 3 untuk memudahkan perbandingan dan interpretasi data.

Tabel 3. Perbandingan dan Interpretasi Data

Tahun	PAD (%)	Transfer (%)	Lain-lain (%)
2020	51%	35%	14%
2021	50%	34%	16%
2022	60%	29%	11%
2023	61%	24%	15%
2024	67%	26%	7%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kontribusi PAD terus meningkat dan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Sebaliknya, kontribusi transfer cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur fiskal Kota Surabaya semakin mandiri, karena tingginya kontribusi PAD merupakan indikator utama kemandirian keuangan daerah (Alexandre et al., 2023).

Analisis Value for Money

Jika ditinjau menggunakan pendekatan value for money, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga aspek ini digunakan untuk menilai apakah pengelolaan anggaran telah dilakukan secara hemat, tepat guna, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan (Maryanti et al., 2021; Syamsidar et al., 2025). Dari sisi ekonomi, pengelolaan anggaran Kota Surabaya dapat dikatakan cukup terkendali. Hal ini terlihat dari penggunaan anggaran yang tidak menunjukkan adanya pemborosan yang signifikan, sehingga pemanfaatan sumber daya masih berada dalam batas yang wajar (Maryanti et al., 2021).

Dari sisi efisiensi, kinerja keuangan menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output yang maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran masih perlu ditingkatkan agar hasil yang diperoleh sebanding dengan sumber daya yang digunakan (Putra et al., 2024; Alexandre et al., 2023). Sementara itu, dari sisi efektivitas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih tepat (Alexandre et al., 2023).

Pembahasan Komprehensif

Secara umum, kinerja keuangan Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik, terutama dalam hal kemampuan daerah mengelola pendapatan secara mandiri. Hal ini tercermin dari kontribusi PAD yang cukup besar terhadap pendapatan daerah, yang menunjukkan adanya kapasitas fiskal yang relatif kuat (Maryanti et al., 2021). Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Efektivitas PAD yang belum sepenuhnya optimal serta efisiensi belanja yang masih perlu ditingkatkan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum mencapai

kondisi yang ideal. Dalam perspektif value for money, kondisi ini mencerminkan bahwa hubungan antara input dan output dalam pengelolaan anggaran masih perlu dioptimalkan (Putra et al., 2024; Syamsidar et al., 2025). Dengan demikian, kinerja keuangan Kota Surabaya dapat dikategorikan baik, tetapi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi pendapatan dan peningkatan efisiensi belanja agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya secara umum berada dalam kondisi yang cukup baik, terutama jika dilihat dari aspek kemandirian fiskal dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini sejalan dengan prinsip dasar otonomi daerah, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi daerah secara mandiri. Tingginya kemampuan fiskal daerah menjadi modal penting bagi pemerintah kota dalam merancang program pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Kota Surabaya dapat dipandang sebagai daerah dengan kapasitas keuangan yang relatif kuat karena mampu menjadikan PAD sebagai sumber utama dalam struktur pendapatan daerah (Maryanti et al., 2021). Hal ini tercermin dari peningkatan rasio kemandirian daerah dari 145% pada tahun 2020 menjadi 256% pada tahun 2024 serta peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal dari 51% menjadi 67% selama periode penelitian, yang menunjukkan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Kota Surabaya telah berjalan cukup efektif dari sisi penguatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah yang memiliki PAD besar cenderung memiliki keleluasaan yang lebih tinggi dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan transfer fiskal pusat. Hal ini penting karena daerah dengan tingkat ketergantungan transfer yang tinggi umumnya memiliki ruang fiskal yang lebih terbatas dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, meningkatnya kontribusi PAD di Kota Surabaya menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal, baik melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, maupun sumber pendapatan lain yang sah (Alexandre et al., 2023).

Kemandirian fiskal yang tinggi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan optimal. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas PAD masih mengalami fluktuasi. Artinya, meskipun PAD Kota Surabaya memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, realisasi pendapatan belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam proses perencanaan, penetapan target, dan strategi pemungutan PAD. Fluktuasi efektivitas PAD menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah belum selalu mampu mencapai target yang telah ditetapkan selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya ruang untuk meningkatkan proses perencanaan, penetapan target, dan strategi pemungutan PAD agar realisasi pendapatan dapat lebih sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Putra et al., 2024).

Fluktuasi efektivitas PAD juga dapat menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya tergali secara maksimal. Sebagai kota metropolitan dan pusat kegiatan ekonomi di Jawa Timur, Surabaya memiliki potensi fiskal yang besar dari sektor perdagangan, jasa, properti, perhotelan, parkir, reklame, dan sektor ekonomi perkotaan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu memperkuat basis data objek pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan digitalisasi sistem pemungutan pendapatan daerah. Penguatan sistem informasi pendapatan daerah menjadi penting agar pemerintah dapat memantau potensi dan realisasi PAD secara lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan (Putra et al., 2024).

Selain aspek efektivitas PAD, efisiensi belanja juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan kinerja keuangan Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belanja belum sepenuhnya stabil. Rasio efisiensi yang berada di atas 100% pada tahun 2020, 2022, dan 2023 terjadi karena realisasi belanja daerah pada ketiga tahun tersebut lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah, sehingga pada tahun-tahun tersebut masih terjadi defisit anggaran sebagaimana ditunjukkan pada hasil penelitian. Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya belanja, tetapi juga dengan sejauh mana belanja tersebut mampu menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Belanja daerah yang besar tetap dapat dikatakan baik apabila diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik lainnya. Sebaliknya, belanja yang tinggi tanpa hasil yang jelas dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian anggaran (Syamsidar et al., 2025).

Dalam pendekatan *value for money*, kinerja keuangan daerah tidak cukup dinilai dari kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga dari kemampuan menggunakan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dari sisi ekonomi, pengelolaan anggaran perlu memastikan bahwa sumber daya diperoleh dengan biaya yang wajar. Dari sisi efisiensi, anggaran harus mampu menghasilkan output yang optimal. Sementara itu, dari sisi efektivitas, program yang dibiayai melalui APBD harus mampu mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tingginya PAD dan kemandirian fiskal Kota Surabaya perlu diimbangi dengan penguatan kualitas belanja agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya kuat secara pendapatan, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat (Maryanti et al., 2021; Syamsidar et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah melalui pendekatan *value for money* penting untuk melihat apakah anggaran telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dapat dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa analisis kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat aspek pendapatan, belanja, efektivitas, efisiensi, dan struktur fiskal daerah (Alexandre et al., 2023; Maryanti et al., 2021).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan pada *value for money* atau rasio tertentu, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena menghubungkan realisasi APBD, rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, derajat desentralisasi fiskal, dan komposisi pendapatan daerah. Dengan pendekatan tersebut, kinerja keuangan Kota Surabaya tidak hanya dipahami dari satu indikator, tetapi dari hubungan antarindikator. Misalnya, kemandirian fiskal yang tinggi memperlihatkan kapasitas pendapatan daerah yang kuat, tetapi efektivitas PAD yang belum optimal menunjukkan bahwa strategi pencapaian target pendapatan masih perlu diperbaiki. Demikian pula, meningkatnya kontribusi PAD menunjukkan struktur fiskal yang semakin mandiri, tetapi efisiensi belanja tetap perlu

diperkuat agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran (Alexandre et al., 2023; Putra et al., 2024).

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya Pemerintah Kota Surabaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengendalian belanja. Peningkatan PAD perlu diarahkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan. Sementara itu, ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menggali sumber pendapatan baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi kota, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Strategi ini penting agar peningkatan PAD tetap sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pelayanan publik (Putra et al., 2024).

Di sisi belanja, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan berbasis kinerja. Setiap alokasi anggaran sebaiknya dikaitkan dengan indikator output dan outcome yang jelas, sehingga belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada manfaat yang diterima masyarakat. Evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, efisiensi belanja dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Penguatan evaluasi belanja juga penting untuk mencegah terjadinya belanja yang kurang produktif dan memastikan bahwa APBD berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang efektif (Syamsidar et al., 2025).

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan fondasi fiskal yang kuat, terutama dari sisi kemandirian dan desentralisasi fiskal. Namun, kekuatan fiskal tersebut masih perlu didukung oleh peningkatan efektivitas PAD dan efisiensi belanja agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal. Dengan kata lain, tantangan utama Pemerintah Kota Surabaya bukan lagi hanya pada kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi pada bagaimana pendapatan tersebut direncanakan, dikelola, dan digunakan secara tepat untuk menghasilkan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keuangan daerah, digitalisasi pengelolaan PAD, perencanaan anggaran berbasis kinerja, serta evaluasi belanja yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya di masa mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama pada aspek kemandirian fiskal dan desentralisasi keuangan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio kemandirian daerah, dan rasio desentralisasi fiskal selama periode penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah semakin dominan sehingga kemampuan keuangan daerah semakin kuat. Namun, kinerja keuangan Kota Surabaya masih menghadapi tantangan pada efektivitas PAD dan efisiensi belanja. Fluktuasi rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa realisasi PAD belum selalu mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan belanja daerah belum stabil selama periode penelitian meskipun mengalami perbaikan pada akhir periode pengamatan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data kuantitatif APBD dan belum menggali faktor internal melalui wawancara. Kesenjangan utama yang ditemukan adalah tingginya kemandirian fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas PAD dan efisiensi belanja. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki fondasi fiskal yang kuat,

yang tercermin dari tingginya kemandirian fiskal dan derajat desentralisasi fiskal. Namun, tingginya kemandirian fiskal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas PAD dan efisiensi belanja yang stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu diimbangi dengan optimalisasi perencanaan pendapatan dan pengendalian belanja agar seluruh indikator kinerja keuangan dapat meningkat secara seimbang. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Aini, E. N., Zuliasari, W., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). *Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah*. *Journal Social Society*, 6(3). <https://doi.org/10.30605/jss.6.3.2026.1327>
- Alexandre, J. F. X., Taufik, M., & Hidayat, H. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan *value for money* pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015–2021. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 201–218. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.982>
- Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan analisis rasio keserasian untuk penilaian kinerja keuangan daerah pemerintah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/64143>
- Heryanti, Y. (2025). Efektivitas pelayanan sektor publik dalam era otonomi daerah. *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 5(1). <https://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/164>
- Hidayatuzzahroh, A., & Lisiantara, G. A. (2025). Pengaruh rasio kemandirian dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019–2023. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(6). <https://doi.org/10.31539/jry41v84>
- Julaeha, R. S., & Penangsang, P. (2024). Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2019–2023. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1), 441–452. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v4i1.65>
- Karlina, A., & Handayani. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012–2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–912. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/988>
- Khosaiful, K., Rahmatulloh, M. I., Taufiqurrahman, N., & Romadhon, M. S. (2024). Membangun otonomi daerah yang efektif: Meninjau kembali kerangka hukum pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48737>
- Madaniyah, R. N., & Widiasih, S. (2024). Evaluasi kinerja manajemen dan keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2020–2022. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9, 37–46. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i10.260>
- Mandasari, Y. E., Darojat, T. A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan

- daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karawang tahun 2022. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11237>
- Marthahudi, R. (2024). Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UU Otonomi Daerah. *Indragiri Law Review*, 2(2), 80–86. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.41>
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2015–2019. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1753>
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Manado tahun 2011–2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20224>
- Prasetyo, Y., Zuhroh, S., & Nugraheni, N. (2023). Peran sinyal keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 1116. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p17>
- Putra, I. G. C., Kepramareni, P., Manuari, I. A. R., & J., L. D. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2017–2022. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 44–115. <https://doi.org/10.35508/jak.v12i2.18339>
- Putri, R. A., & Waryanto, B. D. (2021). Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(3). <https://doi.org/10.36456/jsbr.v2i3.4460>
- Rahmasari, A. G. (2021). Analisis kinerja pemerintah daerah berdasarkan perspektif kinerja keuangan (Studi pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3), 77–86. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Santina, R. (2024). Pengaruh desentralisasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31301>
- Setiani, N., & Sarwono, A. E. (2025). Analisis rasio keuangan APBD untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020–2024. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 233–246. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.957>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Syamsidar, Rusnaldi, & Abadi, C. (2025). Analisis kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2021–2023. *Be-Hisz*, 1(2), 82–93. <https://doi.org/10.71095/mscm3j35>